

## **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### **Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2016-2021 secara terinci sebagaimana Tabel di bawah ini :

**Tabel**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	7	10	13	16	19	5	8	11	14	17	20	6	9	12	15	18	21
11	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																			
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,49	9,94	10,41	10,88	11,83	11,83	12,3	7,6	6,5	7,58	6,34	6,34	7,58	0,76	0,62	0,70	0,54	0,54	0,62
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	16,78	19,57	21,58	23,59	27,61	27,61	29,62	87,39	88,76	94,51	80,85	80,85	94,51	4,47	4,11	4,01	2,93	2,93	3,19
3	Rasio KDRT	0,0306	0,0275	0,0244	0,0213	0,0151	0,0151	0,012	0,0834	0,0181	0,1761	8,5097	8,5097	4,491	3,03	0,74	8,27	563,56	563,56	374,25
4	Persentase Jumlah Tenaga kerja di bawah umur (%)	0,53	0,38	0,3	0,23	0,08	0,08	0	10,96	7,56	11,45	0	0	0	28,84	25,20	49,78	0,00	0,00	0,00
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,55	52,03	53,06	54,09	56,15	56,15	57,18	53,55	53,61	49,19	56,6	57,6	105,15	1,03	1,01	0,91	1,01	1,03	1,84
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,90*)	78,2	78,25	79,86	81,2	79,67	81,88	78,23	79,36	77,03	83,20	82,41	82,41	1,00	1,01	0,96	1,02	1,03	1,01
8	Indek Pembangunan Gender (IPG)	89,33*)	89,34	89,36	90,33	91	89,88	91,34	89,07	88,91	89,13	89,09	89,03	89,03	1,00	0,99	0,99	0,98	0,99	0,97
12	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>																			
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,80*)	1	1,1	1,2	1,4	1,4	1,5	0,58	0,58	0,66	2,24	2,24	2,24	0,58	0,53	0,55	1,60	1,60	1,49
2	Rasio akseptor KB	77,91	78,8	79,7	80,6	82,39	82,39	83,29	78,1	79,2	79,15	79,85	79,85	80,41	0,99	0,99	0,98	0,97	0,97	0,97
3	Cakupan peserta KB aktif (Orang)	376.606	378.790	382.023	394.756	412.413	412.413	425.000	368.652	373.140	319.193	398.563	398.563	404.971	0,97	0,98	0,81	0,97	0,97	0,95
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	183.937	176.103	170.497	164.891	153.678	153.678	148.072	55.110	243.211	244.060	239.740	239.740	239.304	0,31	1,43	1,48	1,56	1,56	1,62

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan pencapaian indikator yang menjadi prioritas daerah dalam Misi Kelima di dalam periode 5 tahun yang akan mendatang menunjukkan Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Tengah seperti Tabel 2.7 nilai 89,03 pada tahun 2021 dan nilai 82,41 pada tahun 2021 untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator ndeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Tengah menunjukkan kinerja yang menurun kecuali pada tahun 2019 hingga tahun 2021 yang mengalami peningkatan sebesar dari 88,91 menjadi 89,03. IPG adalah indikator yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, yang dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki - Laki dan Perempuan. Data tersebut menunjukan bahwa laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan dalam mengisi pembangunan daripada perempuan. IPG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. Walaupun IPM dapat menggambarkan analisis terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi indikator ini belum mampu mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu global. Untuk memenuhi kebutuhan terakhir maka disusun Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing- masing komponennya.

IPG memiliki komponen-komponen pembentuk yaitu angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. IPG merupakan salah satu instrument untuk mengidentifikasi apakah masih terdapat diskriminasi gender. Selisih antara IPM dan IPG sebenarnya menunjukkan tingkat koreksi terhadap IPM yang diakibatkan oleh adanya disparitas gender. Dalam kondisi ideal, yaitu ketika disparitas gender relatif rendah, maka nilai selisih antara kedua indeks ini akan mendekati nol.

Selisih antara IPM dan IPG pada suatu wilayah pada dasarnya memperlihatkan tingkat disparitas atau kesetaraan gender dalam capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut. Maksudnya, jika selisih antara IPM dan IPG untuk suatu wilayah semakin besar maka kesetaraan gender dalam

---

pembangunan manusia di wilayah tersebut semakin buruk, sebaliknya jika selisihnya semakin kecil maka kesetaraan gendernya akan semakin baik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menuju untuk meningkatkan IPG melalui peningkatan Kinerja Pembangunan dalam IPM dan Pembangunan Responsif Gender. Kesetaraan Gender adalah tujuan dalam Pembangunan Responsif Gender yang dilakukan melalui pendekatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara baik laki-laki, perempuan, lanjut usia, kaum disabilitas maupun anak-anak. Dalam hal komitmen Kalimantan Tengah telah mempunyai Payung Hukum dalam bentuk Perda No 4 Tahun 2014 tentang Pengrusutamaan Gender (PUG) sebagai dasar Pembangunan Responsif Gender menuju Kesetaraan Gender di Kalimantan Tengah. Melalui Perda ini semua perangkat daerah, swasta, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidangnya masing masing.

Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Instruksi kepada para Menteri/KL, para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah; PUG adalah strategi yang harus dilaksanakan di semua bidang pembangunan, dikuatkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Permendagri tersebut PUG dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Prasyarat PUG yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, sumberdaya manusia, system informasi data terpilah gender, alat analisis untuk menemuknenali isu gender dan partisipasi lembaga masyarakat. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender dalam misi RPJMD 2021-2026 menunjukkan selain meningkatkan peran religiusitas masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal proses pembangunan Kalimantan Tengah juga memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender. Kebijakan yang berwawasan gender sangat diperlukan, maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator atau pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini pula setiap pelaksanaan program akan selalu menunjukkan bentuk kesetaraan, keadilan, demokratis dan transparansi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

---

Dibandingkan dengan Provinsi lainnya IPG Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 pada nilai indeks 89,03 masih rendah dan demikian juga masih sedikit lebih rendah di bawah rata-rata nasional yang mencapai angka sebesar 91,06 artinya secara rata- rata kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar gender, laki-laki dan perempuan di Kalimantan Tengah masih belum optimal dan belum melalui perencanaan dan penganggaran tematik atau untuk menyelesaikan isu-isu gender yang ada.

IPG dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1) derajat kesehatan khususnya kesehatan ibu hamil dan bayi; 2) tingkat pendidikan masyarakat baik perempuan dan laki-laki dalam mengenyam pendidikan; 3) tingkat ekonomi perempuan dalam mendapatkan penghasilan atau uang. Masih cukup tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); tingkat pendidikan yang belum maksimal memberikan kesempatan dan peluang yang sama pada gender.

**Tabel**  
**Pembandingan antara IPM Perempuan dan IPG tahun 2016-2021**

Tahun	IPM perempuan	IPG
2016	69,13	89,07
2017	69,79	88,91
2018	70,42	89,13
2019	70,91	89,09
2020	71,05	89,03
2021	71,05	89,03

*(Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah )*

Tabel berikut melihat IPM dan IPG saling terkait. Jika IPM Naik maka IPG juga, demikian sebaliknya. Maka itu Pembangunan Responsif Gender banyak dipengaruhi Indikator IPM. Dapat di tarik kesimpulan bahwa IPM dan IPG Kalimantan Tengah merupakan Indikator yang terkait dengan pembangunan Responsif Gender. Secara umum pencapaian pembangunan manusia dan gender semakin membaik meskipun capaian pembangunan manusia perempuan belum mampu menyamai laki-laki.

Ada tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan

---

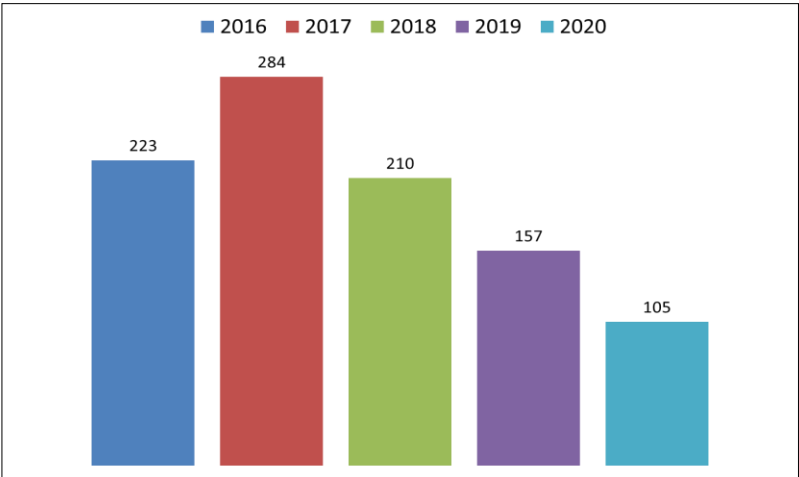
teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislatif atau eksekutif sangat mempengaruhi Status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyai hak akses (ikut), partisipasi (mempunyai suara), kontrol (ikut mengambil keputusan) dan manfaat (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi. IDG Tahun 2020 sebesar 82,41 lebih rendah 0,79 poin dari tahun 2019 sebesar 83,20 akan tetapi pencapaian target Kalimantan Tengah melebihi target nasional sebesar 75,57 dan peringkat pertama nasional untuk IDG. Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya keterlibatan perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga manager, profesional administrasi dan teknis, sumbangan dalam pendapatan kerja. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan perlemen, tenaga profesional dan ekonomi.

Berdasarkan pencapaian indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) yaitu berada pada nilai rasio minimum 0,54 yaitu pada tahun 2019 dan 2020 dengan pencapaian 6,34%. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV. Data ini menunjukkan masih belum terdata tentang partisipasi perempuan di pemerintahan karena faktor berkurangnya jumlah perempuan di lembaga pemerintahan karena pensiun dan tes penerimaan CPNS baru dilaksanakan akhir tahun 2019 dan SK pengangkatan CPNS baru terdata jumlahnya di tahun 2021.

Berdasarkan pencapaian indikator Rasio KDRT berada pada nilai rasio maksimum yaitu 563,56. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat meningkat setelah dilaksanakan Sosialisasi tentang Undang-undang/Peraturan tentang Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, sehingga korban atau keluarga korban berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Kasus Kekerasan di Kalimantan Tengah saat ini baik di Kabupaten Kota telah banyak terjadi tidak saja kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan dan anak namun juga kasus pelecehan seksual juga menjadi perhatian seluruh dinas maupun instansi terkait baik Pemerintah

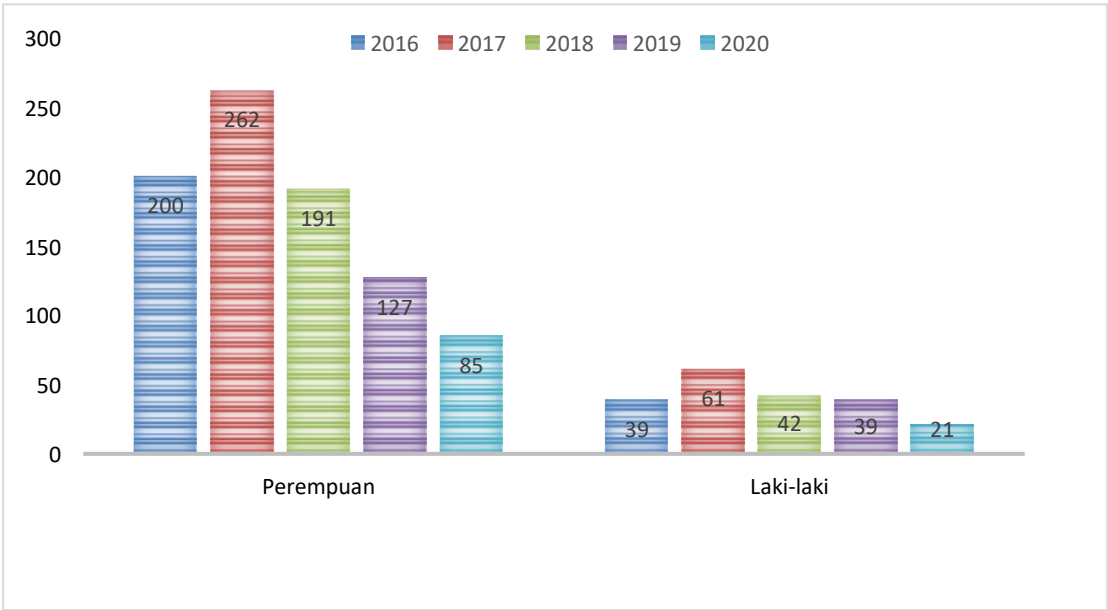
---

Kota maupun Provinsi. Melalui peran UPT PPA di tingkat provinsi dan di setiap kabupaten Kota sebagai pengganti satgas perlindungan perempuan dan anak diharapkan kasus KDRT di Kalimantan Tengah dapat diatasi.



Gambar Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah

Sementara itu berdasarkan data yang dimiliki admin sistem informasi *online* perempuan dan anak Simfoni P3APKB Kalteng pelaporan terhadap tindak kekerasan di Kalimantan Tengah sejak tahun 2016 yaitu 223 kasus, tahun 2017 sebanyak 284 kasus, tahun 2018 yaitu 210 kasus, korban kasus menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 74 orang, tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebanyak 43 kasus sehingga menjadi 157 kasus yang dilaporkan, terakhir di tahun 2020 terjadi penurunan juga pada pelaporan kasus sebanyak 52 kasus menjadi 105 kasus yang dilaporkan.



Gambar Jumlah korban berdasarkan jenis kelamin Berdasarkan kasus yang ada korban kekerasan lebih banyak

didominasi oleh kaum perempuan. terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

- Faktor individu perempuan

Jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

- Faktor pasangan

Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.

Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami mengganggu beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak mengganggu. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk.

Perempuan dengan suami pengguna narkoba beresiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkoba. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkoba tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6%

---



mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan fisikdan/seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas. Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

- Faktor ekonomi

Perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumahtangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.

- Faktor sosial budaya

Seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan

Bencana Pandemi *Covid-19* yang terjadi saat ini, disadari atau tidak telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kaum perempuan. Krisis yang terjadi semakin memperlihatkan bagaimana perempuan seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif serta mengalami tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal, dan psikis. Pandemi *Covid-19* telah memberikan berbagai efek domino bagi perempuan, mulai dari hilangnya mata pencaharian perempuan yang bekerja pada sektor informal, dimana sekitar 61,37% perempuan Indonesia bekerja pada sektor informal, meningkatnya angka kekerasan terhadap

---

perempuan, hingga meningkatnya beban pekerjaan domestik bagi perempuan pada masa pandemi *Covid-19*. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial yang termasuk bekerja dan bersekolah dari rumah, juga membuat perempuan lebih rentan stress karena menambah beban pekerjaan domestik yang selama ini dilekatkan kepada mereka (*Komnas Perempuan, 2020*).

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Berdasarkan pencapaian indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga yaitu berada pada nilai rasio minimum 0,53 yaitu pada tahun 2017 dengan pencapaian 0,58 rata-rata jumlah anak. Walaupun terjadi penurunan rata-rata jumlah anak per wanita usia subur menjadi 0,58 anak tahun 2017, bukan berarti jumlah penduduk akan semakin menurun. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga adalah jumlah anak yang dilahirkan per keluarga. Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun). Program KB yang selama ini menjadi program utama pencegahan meledaknya penduduk sangat dianggap bermanfaat bagi Indonesia. Dengan melihat kedudukan Indonesia menduduki peringkat ke empat penduduk paling banyak di dunia. Pemerintah terus menyosialisasikan pentingnya program Keluarga Berencana untuk meredam ledakan penduduk. Perempuan di Indonesia lebih bebas mempunyai anak tidak seperti di beberapa negara lain yang pemerintahnya membatasi tiap keluarga hanya punya 1 anak.

Berdasarkan pencapaian indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yaitu berada pada nilai rasio maksimum 1,62 yaitu pada tahun 2021 dengan pencapaian 239.304 keluarga. Tingkat kesejahteraan menurut indikator keluarga sejahtera adalah keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan baik yang bersifat dasar, sosial-psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Program pembangunan keluarga sejahtera sudah dilakukan oleh untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Adapun ruang lingkup dapat dikatakan keluarga sejahtera yaitu dapat terpenuhi kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan psikologi. Kesejahteraan keluarga disini dapat dinilai melalui 13 variabel. Variabel tersebut meliputi agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan, informasi, transportasi, dan peranan dalam masyarakat. Ketigabelas variabel tersebut kemudian dituangkan menjadi 21 item yang terbagi ke dalam lima tahapan sesuai

---

dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III), dan keluarga sejahtera III plus (KS III Plus). Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS I

- Tahapan Keluarga Prasejahtera (KPS)

Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera I.

- Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat kebutuhan psikologis (*psychological needs*) keluarga. Indikatornya yaitu:

- a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.